



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RIFKI ANATA MUSTAQIM
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN FASILITASI KEPALA DAERAH DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
3. NHK : 697064

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.480.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 768 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 592 m2/294 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 965 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 19.000.000

1. MOTOR, SCOOPY SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 6.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 42.992.269**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.547.992.269**III. HUTANG** Rp. 208.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.339.992.269**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Khusus - Akhir Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ANSAR
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 733818

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1302 m<sup>2</sup>/112 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 161.000.000

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 6 M/T / MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11CF1C A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 3.400.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 278.272

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 464.678.272

**III. HUTANG** Rp. 35.824.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 428.854.272

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUH NUR

2. Jabatan : SEKRETARIS

3. NHK : 746411

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 345.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 345.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 8.700.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO 28 D (MIO/AL1155)A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. LAINNYA, SEPEDA TRHIL SEPEDA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 135.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 488.700.000

**III. HUTANG** Rp. 321.765.600

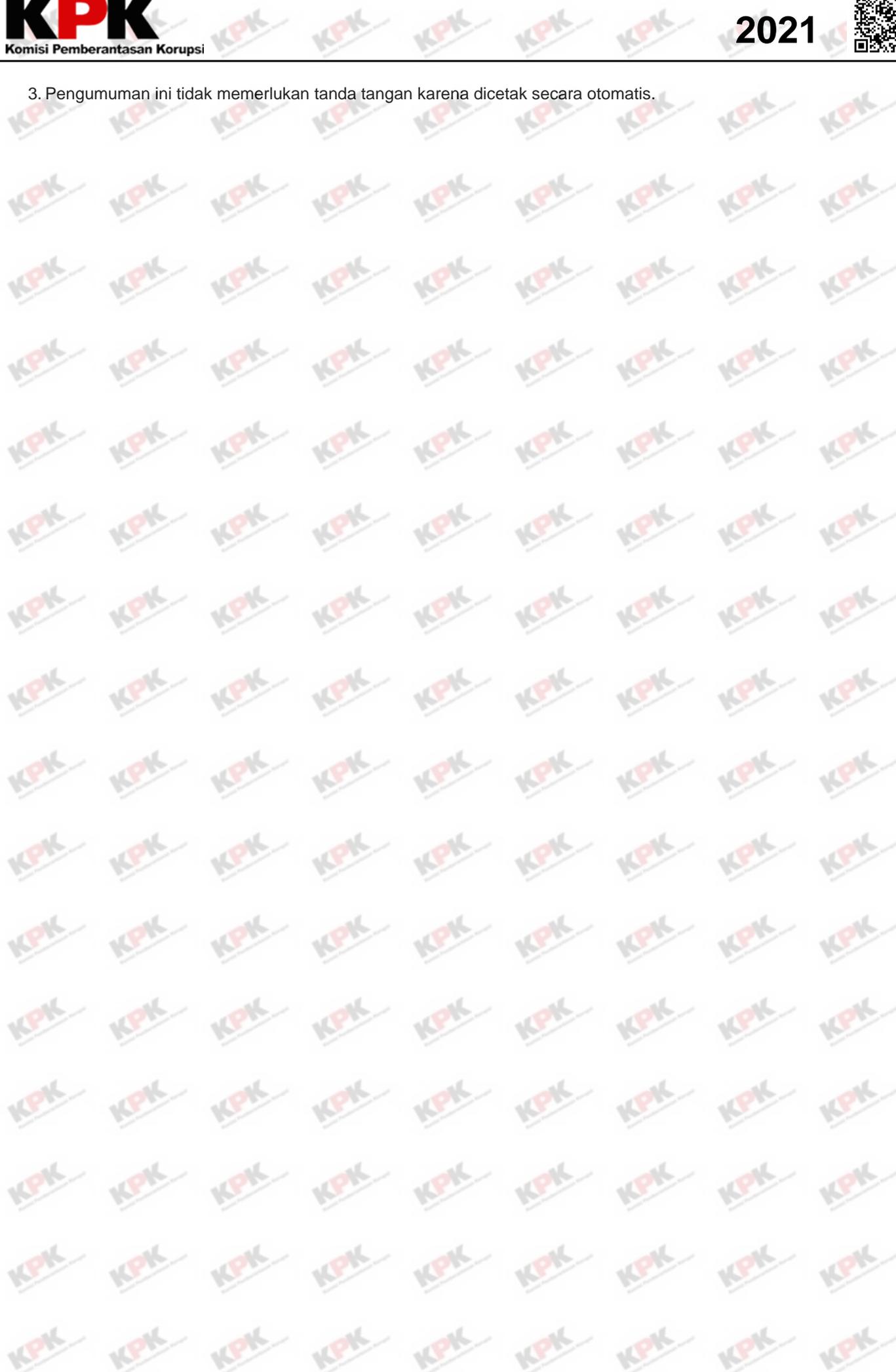
**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 166.934.400

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUSTAQIM KARIM
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 487974

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 673.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 525 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 673.800.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 335.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 1KP A/T / SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V / MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 1.600.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 6.980.423

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.017.380.423

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.017.380.423

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JINTAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 678272

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	246.000.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5S M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOBIL, KIJANG INOVA CRUISER (TGN40R GKMD KD 02) Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000		
4. MOTOR, YAMAHA IKP A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	9.560.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	67.708.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	323.268.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	323.268.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ABDUL RAHMAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **748073**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **104.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA YUPITER Z/SOLO Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANVA / MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **124.938.300**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **100.869.860**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **----**

**Sub Total** Rp. **729.808.160**

**III. HUTANG** Rp. **----**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **729.808.160**

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RINA SETIAWATI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
3. NHK : 810277

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	122.200.000
1. MOTOR, YAMAHA SOUL GT MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.200.000		
2. MOBIL, NISAN XTRAIL MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	17.274.423
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	139.474.423
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	139.474.423

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RIAN DHARMAWAN
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PAJAK
3. NHK : 486768

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>200.000.000</b>
1. Tanah Seluas 1138 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>99.000.000</b>
1. MOBIL, INNOVA MINIBUS Tahun 2006, WARISAN Rp. 95.000.000		
2. LAINNYA, SEPEDA LIPAT AVAND CHESTER X SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>38.910.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>20.845.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>358.755.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>317.043.307</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>41.711.693</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NOVA ISMALA DEWI
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PAJAK DAERAH
3. NHK : 487921

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 658 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	280.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOBIL, AYLA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	7.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	487.000.000

**III. HUTANG** Rp. 120.048.500

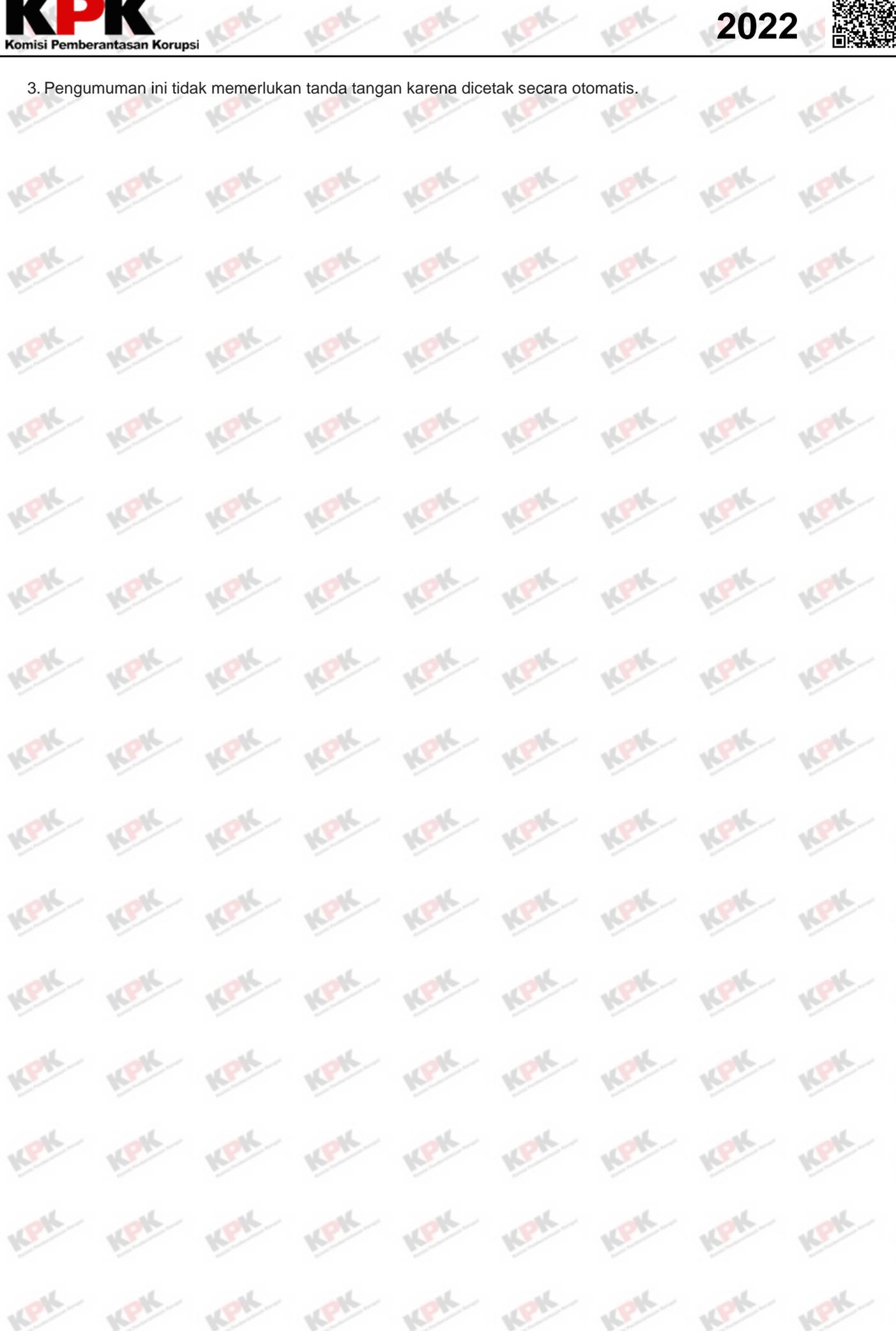
**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 366.951.500

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SARYAWATI RASYID SALAM
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN DAN KEBERATAN PAJAK DAERAH
3. NHK : 748148

**II. DATA HARTA**

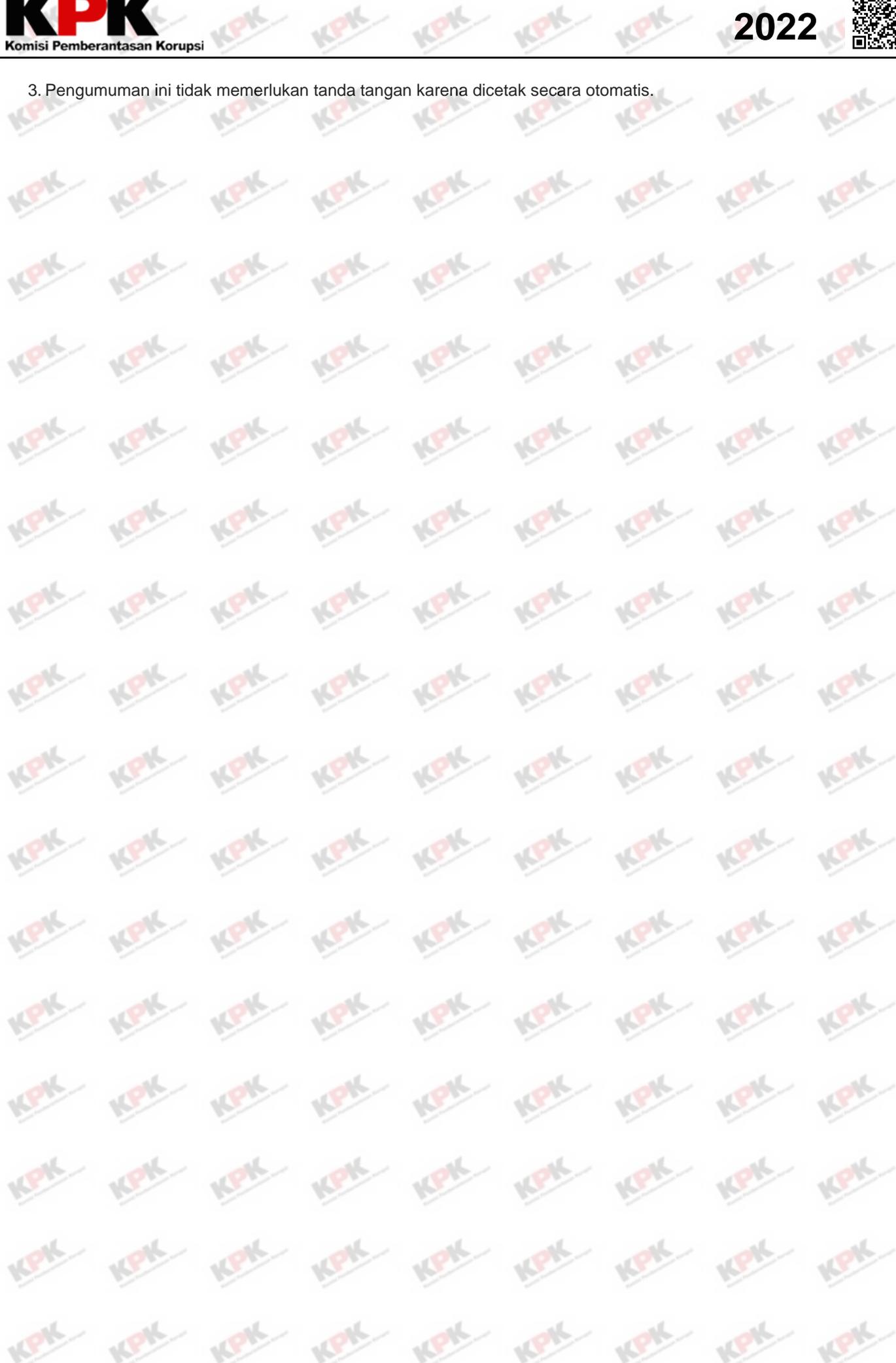
<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>535.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>17.000.000</b>
1. MOTOR, YAMAHA BY8 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>1.400.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>10.123.574</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>563.523.574</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>166.307.189</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>397.216.385</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **HERLINA TONGKO**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN**
3. NHK : **667650**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 2.175.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 1.130.000.000
2. Tanah Seluas 1062 m2 di KAB / KOTA POSO, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 640.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, AVANZA SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 128.000.000**

**D. SURAT BERHARGA**

**Rp. ---**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

**Rp. 547.000.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.490.000.000
III. HUTANG	Rp.	169.724.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.320.276.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WAHDAYANI
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG UNDANGAN
3. NHK : 228227

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	240.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	7.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	52.580.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	15.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	314.580.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	314.580.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : GUNAWAN
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG SISTEM INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA
3. NHK : 860443

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	50.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG STANDART KF 40 SHORT Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SCOOTER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	14.305.156
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	22.650.000
Sub Total	Rp.	86.955.156
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	3.744.900
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	83.210.256

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUPARDIN KAHAR
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG DANA BAGI HASIL PUSAT
3. NHK : 488093

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 770.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 407 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HIBAH TANPA AKTA Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 343 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Bangunan Seluas 45 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 8000 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, WARISAN Rp. 10.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 18.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 16.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 804.000.000

**III. HUTANG**

Rp. 130.440.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 673.560.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SOFIAN**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH DAN PAD**
3. NHK : **748015**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **550.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 585 m2/71 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **137.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA 2DP-RA/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
2. MOBIL, SUZUKI DR 412 (4X2) MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **---**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **3.640.000**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **---**

**Sub Total** Rp. **691.140.000**

**III. HUTANG** Rp. **542.455.793**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **148.684.207**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2022/Khusus - Akhir Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MURATNI
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN RETRIBUSI DAN PLL
3. NHK : 672095

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/130 m2 di KAB / KOTA TOLITOLI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	118.500.000
1. MOTOR, ZUSUKI FU FU 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	345.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	868.845.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	27.667.554
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	841.177.446

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ISKANDAR
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN KEUANGAN ,ASET DAN PERSONIL
3. NHK : 486865

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 720.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 438 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 720.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 175.000.000

1. MOBIL, KIJANG LSX MINIBUS Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO NC 110 D Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BJ 8 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 21.400.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 6.525.400

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 922.925.400

**III. HUTANG** Rp. 252.832.587

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 670.092.813

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MEISYURA PAKAYA
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM
3. NHK : 764465

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.590.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 981 m2/63 m2 di KAB / KOTA POSO, HADIAH Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 510 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HADIAH Rp. 45.000.000
3. Tanah Seluas 543 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HADIAH Rp. 45.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 144.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER SPORT 2.01 PX-E (4X2)AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BTZ W A/T SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 14.340.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 17.004.142

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.765.344.142

**III. HUTANG** Rp. 40.266.600

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.725.077.542

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **GINA ANGRANI YUNUS**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**
3. NHK : **897703**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **650.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m<sup>2</sup>/140 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **26.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MATIC NMX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **5.800.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **146.512**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **---**

**Sub Total** Rp. **681.946.512**

**III. HUTANG** Rp. **283.243.244**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **398.703.268**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.